

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai dengan diterbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Terdapat banyak perubahan fundamental yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Perubahan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan diantaranya adalah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyelenggarakan akuntansi. Penyelenggaraan proses akuntansi tersebut diatur dengan adanya sistem akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan proses akuntansi tersebut K/L wajib menyusun laporan keuangan K/L (LKKL). Untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan ini, telah dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan adanya perubahan ini sejak tahun 2004 sampai sekarang pemerintah pusat telah berhasil menyusun laporan keuangan yang meliputi LKKL dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP merupakan penggabungan dari keseluruhan LKKL.

BPK-RI, sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai eksternal audit atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah diwujudkan dalam bentuk opini audit. Opini audit terdiri dari lima jenis. Kelima opini audit tersebut adalah :Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak memberikan Pendapat (TMP), serta Tidak Wajar (TW).

Pemberian opini audit oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pemberian opini audit ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan pemerintah atas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut.

Salah satu yang mempengaruhi opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah baik LKKL maupun LKPP adalah tentang aset negara terutama aset tetap. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Ini tercermin dalam laporan keuangan pemerintah, dimana nilai aset tetapnya memiliki nilai paling besar dibanding komponen lain. Keberadaan aset tetap ini juga mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tidak tertibnya penatausahaan dan pengelolaan aset tetap menjadi salah satu penyebabnya. Permasalahan aset tetap dapat mempengaruhi opini apabila ada kondisi terjadi pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Kondisi lainnya adalah terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kondisi-kondisi ini harus dikaitkan dengan tingkat materialitas akun aset tetap dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Pembenahan tata kelola aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial ditengah usaha pemerintah untuk meningkatkan citra

pengelolaan keuangan negara yang baik melalui Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan, seperti kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Istilah ‘permasalahan’ yang merupakan pokok masalah dari temuan pemeriksaan di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Oleh karena aset tetap merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan pemerintah yang seringkali dikecualikan oleh BPK RI pada saat menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan, sehingga harus adanya perhatian khusus guna meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan penatausahaan dan pengelolaan serta strategi yang dipakai pada saat melakukan pengelolaan aset tetap. Salah satunya adalah tentang manajemen aset. Manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai proses monitoring aset selama umur penggunaannya oleh Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan aset negara harus dilakukan secara optimal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Menurut Stándar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Penyajian aset dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Negara (KUN).

Penelitian yang meneliti tentang permasalahan aset, seperti yang dilakukan oleh Hilda Gustrina Dewi (2012) menyimpulkan ada 5 permasalahan utama aset tetap Kementerian/Lembaga yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan; masalah dalam penggunaan, masalah penganggaran, masalah pengadaan dan penghapusan, serta masalah perencanaan. Penyebab masalah ini timbul disebabkan sulitnya menyelesaikan IP karena banyaknya aset tetap yang di nilai dengan lokasi aset tetap yang tersebar, belum optimalnya hasil sosialisasi dan pembinaan yang di lakukan K/L pada satkernya.

Dari hasil audit BPK RI atas laporan keuangan kementerian/lembaga, masih terdapat banyaknya temuan audit untuk aset tetap. Ada beberapa faktor yang masih menjadi kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara yaitu:

1. Lemahnya pengendalian internal kementerian/lembaga atas aset tetap.
2. Nilai aset tetap yang belum ditentukan.
3. Banyaknya aset yang belum diketahui jumlah, lokasi dan statusnya yang tidak jelas.
4. Pencatatan aset tetap belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Aset tetap belum dilengkapi bukti kepemilikan.
6. Belum semua aset tetap tercatat di SIMAK BMN.
7. dll

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **ANALISIS TEMUAN ASET TETAP PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**”

### **1.1 Rumusan Masalah**

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis aset tetap manakah yang menjadi temuan di Kementerian/Lembaga tahun 2012 - 2014?
2. Kementerian/Lembaga mana yang paling banyak aset tetapnya menjadi temuan tahun 2012 - 2014?
3. Apa permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan di Kementerian/Lembaga tahun 2012 - 2014?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis aset tetap manakah yang menjadi temuan di Kementerian/Lembaga tahun 2012 - 2014.
2. Untuk mengetahui Kementerian/Lembaga mana yang paling banyak aset tetapnya menjadi temuan tahun 2012 - 2014.
3. Untuk mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan di Kementerian/Lembaga tahun 2012 - 2014.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan/pengetahuan jenis aset tetap yang menjadi temuan di Kementerian/Lembaga tahun 2012 - 2014.
2. Memberikan wawasan/pengetahuan Kementerian/Lembaga yang paling banyak aset tetapnya menjadi temuan tahun 2012 - 2014.
3. Memberikan wawasan/pengetahuan permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan di Kementerian/Lembaga tahun 2012 - 2014.

### 1.5 Keterbatasan Penelitian

#### 1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Keterbatasan didalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada analisis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya berdasarkan analisa dan observasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan opini audit yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Dalam penelitian Analisis Temuan Aset Tetap Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dipakai data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2012 - 2014. Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diperoleh dari BPK RI, sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai eksternal audit. Periode ini dipilih karena pada tahun tersebut ada kemajuan opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.



